



JURNAL ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Volume 1, Nomor 1, Juli 2012

Terbit dua kali setahun pada bulan Januari dan Juli, dalam satu volume ada empat nomor. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian. Artikel telaah (*review article*) dimuat atas undangan ISSN. xxxx - xxxx

Penanggung Jawab

Deden Mulyana
Dedi Kusmayadi

Penyunting

Edi Kusmayadi

Wakil Penyunting

Akhmad Satori

Penyunting Pelaksana

Mohammad Ali Andrias
Taufik Nurohman
Subhan Agung
Hendra Gunawan

Sirkulasi dan Tata Usaha

Rino Sundawa Putra
Fitriani Yuliyawati
Wiwi Widiastuti

Pembantu Tata Usaha

Ika Kartika
Rian Riana

Alamat Penyunting dan Tata Usaha : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jl. Siliwangi No.24 Tasikmalaya Telp. 0265-330634/ 081328774850 Fax. 0265-325812 email. jipp_unsil@yahoo.co.id web site. <http://fisip.unsil.ac.id>

Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan terbit sejak bulan 30 Juli 2012, oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Siliwangi Tasikmalaya.

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di kertas HVS A4 spasi ganda lebih kurang 20 halaman, dengan format seperti tercantum dalam halaman belakang (Panduan Penulisan Naskah JIPP). Naskah yang masuk dievaluasi, disunting untuk keseragaman format, istilah, dan tata cara lainnya.

Dicetak di Percetakan LPPM Press, Isi diluar Tanggung jawab Percetakan



JURNAL ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Volume 1, Nomor 1, Juli 2012

DAFTAR ISI

Dewan Penyunting	i
Pengantar Penyunting	ii
Daftar Isi	iii
Tantangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam <i>E- Government</i> <i>Adhi Iman Sulaiman</i> , Univ. Jenderal Soedirman Purwokerto	1-12
Paradigma Politik Klasik Dalam Ilmu Politik <i>Mohtar Haboddin</i> , Universitas Brawijaya Malang	13-23
Dominasi Negara dalam Masyarakat Adat: Studi Masyarakat Kuta, Karangpaningal Ciamis. <i>Subhan Agung</i> , Universitas Siliwangi Tasikmalaya	24-42
Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah <i>Hari Walujo Sedjati</i> , STISIP Kartika Bangsa Yogyakarta.	43-60
Pergeseran Perilaku Politik Islam Tradisional : Studi Kasus Pergeseran Perilaku Memilih Nahdyyin di Kota Tasikmalaya <i>Akhmad Satori & Moh. Ali Andrias</i> , Universitas Siliwangi Tasikmalaya	61-78
Pemikiran Politik Islam Tentang Hubungan Antara Agama, Negara Dan Kekuasaan <i>Sofa Marwah</i> , Universitas Jenderal Soedirman & <i>Nur Iman Subono</i> , Universitas Indonesia	79-96
Prospek Politik Islam di Indonesia <i>Hendra Gunawan</i> , Universitas Siliwangi Tasikmalaya	97-108
Indeks Subjek Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan (JIPP)	109
Indeks Pengarang Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan (JIPP)	111
Indeks Mitra Bebestari Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan (JIPP)	113
Pedoman Penulisan Naskah JIPP	115

ANALISIS TERHADAP PROSPEK POLITIK ISLAM INDONESIA

Hendra Gunawan

Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Jl. Siliwangi No. 24 Tasikmalaya 46155
rhoma_hendra@gmail.com

Abstrak

Keberadaan Islam jauh lebih dulu ada di wilayah Nusantara dari apa yang kita sebut sekarang ini dengan sebutan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu juga peran politik umat Islam sudah ada sebelum Indonesia terbentuk. Kerajaan Aceh Darussalam, Malaka, Demak, Cirebon, serta Ternate adalah bentuk peran politik umat Islam di wilayah-wilayah pra Indonesia. Meskipun Islam sudah setua dengan apa yang digambarkan diatas, politik umat Islam di masa-masa Indonesia merdeka tidak begitu menggembirakan. Sebut saja misalnya ketika terjadi perdebatan sengit yang membahas tentang bentuk Negara, Islam atau nasionalisme. Islam secara langsung berkonfrontasi dengan faham yang belakangan ada, yaitu nasionalisme. Dan disini Islam mengalami kekalahan telak. Hal itu ditandai dengan dihapuskannya tujuh kata dalam piagam Jakarta yang menurut Kartosuwiryo merupakan bentuk kekalahan pertama politik Islam di Indonesia.

Kata Kunci: politik Islam, negara, agama

Abstract

The presence of Islam is much earlier there in archipelago of indonesia than what we call today as the territory of the Republic of Indonesia. As well political role of Islam existed before Indonesia was formed. Kingdom of Aceh Darussalam, Malacca, Demak, Cirebon and Ternate is a form of political role of Muslims in the areas of pre Indonesia. Although Islam is as old as to what is described above, Muslim politics in times of Indonesia's independence is not so encouraging. Call it like when there is intense debate about the form that of State, Islam or nationalism. Islam is directly confronted with the schools of the latter exist, that is nationalism. And here Islam suffered a major defeat. It was marked by the elimination of seven words in the charter of Jakarta which according to Kartosuwiryo is a form of the first defeat of political Islam in Indonesia.

Keywords: *political Islam, state, religion*

Perdebatan antara hubungan Islam dan politik tidak akan pernah berhenti, baik itu di dunia Islam maupun di Indonesia. Di Indonesia, relasi antara Islam dan politik sudah ada semenjak Islam masuk, akan tetapi perdebatan yang sistematis baru terjadi pasca kemerdekaan Indonesia. Dimana perdebatan itu begitu vulgar ketika diadakannya rapat BPUPKI dan memuncak dengan keluarnya piagam Jakarta. Namun, pada akhirnya hubungan antara Islam dan

politik dalam bentuk formal tidak terealisasi dalam konstitusi Indonesia, sehingga jalan alternatifnya adalah terbentuklah Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia¹.

Pancasila yang bernafaskan sekuler ini sudah menjadi postulat politik bagi sistem politik di Indonesia, sehingga terasa

¹ Untuk lebih jauh mengetahui pergumulan Islam di Indonesia dalam awal-awal terbentuknya NKRI baca buku *Pergumulan Islam Di Indonesia* Karangan B.J Boland

tidak ada ruang lagi bagi Islam politik di Indonesia. Jika ada itu pun hanya sebatas pada tatanan substansi bukan pada tatanan formalitas. Jadi eksistensi Islam politik Indonesia masih tahap dialektika dalam kekangan ideologi Pancasila. Namun, cita-cita untuk mendirikan Negara Islam akan tetap selalu ada di masyarakat Indonesia. Tetapi pilihan untuk sekulerisme bukan merupakan pilihan yang buruk untuk Indonesia dalam menanggapi relasi antara Islam dan politik².

Disisi lain, peranan partai politik terutama partai-partai Islam akan tetap menghiasi perdebatan politik Islam di Indonesia. Sehingga partai-partai Islam bisa jadi indikator bahwa politik Islam tetap eksis di Indonesia.

Kerelevanan Syariat Islam : *Antara Ya dan Tidak*

Politik menurut perspektif syari'at, ialah yang menjadikan syari'at sebagai pangkal tolak, kembali dan bersandar kepadanya, mengaplikasikannya di muka bumi, menancapkan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip-Nya di tengah manusia, sekaligus sebagai tujuan dan sasarannya, sistem dan jalannya³. Tujuannya berdasarkan syari'at dan sistem yang dianut juga berdasarkan syari'at. Apabila ditinjau dari konsep sekarang syariat itu bisa dimaknai

sebagai penerapan nilai nilai Islam dalam sistem politik baik itu peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, tata negara dalam bentuk formalitas, sehingga syariat Islam dianggap sebagai solusi bagi yang ideal untuk negara.

Disamping itu, teori Donald K Emmerson mengemukakan tesis bahwa "*Islam yang berada diluar kekuasaan adalah Islam yang tidak lengkap*" atau "*umat Islam yang tidak terus mengupayakan terwujudnya Negara Islam adalah umat Islam yang tidak berbuat yang sesungguhnya demi Islam*". Maksudnya, kelompok Islam militan berpandangan bahwa Islam dan politik tidak dapat dipisahkan, karena mereka percaya bahwa Islam yang berada diluar kekuasaan adalah Islam yang tidak lengkap. Yang harus di pertanyakan pada kondisi sekarang ialah "apakah formalitas Negara Islam itu bisa di terapkan pada zaman sekarang?"⁴.

Untuk itu, sebagian muslimin menganggap syariat Islam bahwa syariat Islam itu relevan untuk semua zaman, kondisi dan tempat. Kerelevansian syariat Islam ini banyak ditunjukkan dalil-dalil *Qath'i*, baik berupa wahyu, bukti sejarah maupun bukti realistik. Sedangkan sebagian yang lainnya menganggap bahwa syariat Islam tidak sesuai dengan konteks politik kontemporer. Diantaranya pemikir kontemporer yang lebih moderat adalah Abduh yang mengemukakan bahwa "organisasi politik bukanlah persoalan

² Effendy, Bahtiar. "Repolitisasi Islam." Dalam A. Suryana Sudarjat, ed., *Fenomena Partai Islam* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 205.

³ Yusuf Al-Qardhawi *Membumikan Syariat Islam*. Penerjemah Drs. Muhammad Zaki dan Drs. Yasir Tajid (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997).

⁴ Dalam Antony Black, *Pemikiran Politik Islam*, Penerjemah Abdullah Ali (Jakarta: Serambi, 2006).

ditetapkan oleh ajaran Islam, melainkan oleh situasi dan waktu.

Dengan demikian, sistem politik seperti apa yang seharusnya diterapkan dalam situasi di Indonesia yang mayoritas muslim. Apakah harus memaksakan berdirinya Negara Islam atau tetap mempertahankan sistem politik yang sudah ada yang cenderung bersifat sekuler.

Jika berpedoman pada pendapat qardhawi, maka syariat Islam atau Negara Islam harus jadi azas ideologis Negara di Indonesia⁵. Tetapi apakah Negara Islam tersebut akan relevan untuk kultural masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk. Padahal dalam sejarah politik di Indonesia, wacana Negara Islam telah ada di saat pembentukan ideologi Negara, walaupun pada akhirnya kekalahan berpihak kepada politik Islam.

Yang muncul kemudian ialah Pancasila sebagai ideologi Negara, dimana Pancasila ini lebih cenderung bersifat sekuler. Walaupun ada yang beraanggapan bahwa dijadikannya Pancasila sebagai ideologi Negara tidak dianggap sebagai perwujudan dari keinginan untuk memisahkan agama (Islam) dari Negara. Dengan dimasukkannya sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam dasar Negara itu, maka Indonesia sudah dipandang sebagai “Negara Islam”.

Tetapi pada kenyataannya Pancasila itu lebih bercorak sekuler, walaupun masih ada sila yang bersifat teologis. Perkembangan selanjutnya akan terasa sulit jika formalitas politik Islam dalam Negara Islam itu

dipaksakan dalam konstitusi politik di Indonesia.

Namun sekarang, wacana dan format politik Islam yang bersifat formalitas tetap ada di Indonesia, tetapi hanya terjadi pada daerah-daerah tertentu yang bagian dari kesatuan Republik Indonesia. Tetapi tidak akan berlanjut pada pembentukan Negara Islam secara keseluruhan. Walau sebagian daerah menerapkan syariat Islam sebagai landasan politiknya, bukan berarti diikuti pula oleh Negara.

Partai Islam sebagai Indikator Politik Islam di Indonesia

Partisipasi Muslim dalam bidang politik telah menghiasi percaturan politik tanah air, bahkan sejak negara ini belum merdeka dan mulai diperkenalkannya sistem politik demokratis modern. Tercatat sejak tahun 1929 Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) berdiri sebagai suatu wadah perjuangan untuk merebut kemerdekaan dari penjajah. Kemudian pada tahun 1945 berdiri partai politik Islam Masyumi sebagai satu-satunya wadah perjuangan umat Islam dalam bidang politik, meski kemudian partai ini terpecah dengan keluarnya NU dan PSII⁶.

Dalam perjalanan berikutnya partai-partai Islam mengalami pasang surut. Diantaranya dapat dilihat pada masa orde lama, dimana Soekarno memberangus keberadaan Masyumi dalam peta politik Indonesia. Demikian pula pada masa

⁵ Al-Qardhawi, *Ibid.*,

⁶ Effendy, *Ibid.*, hlm. 205.

orde baru, dimana orde baru melakukan restrukturisasi sistem kepartaian pada tahun 1973. Restrukturisasi ini memaksa setiap partai untuk berfusi menjadi satu, baik itu partai Islam maupun partai nasionalis. Sehingga, setelah peraturan itu partai-partai di Indonesia termasuk partai Islam harus berazaskan Pancasila, maka mulai saat itu tidak ada lagi partai Islam yang resmi membawakan suara Islam. Aspirasi umat Islam sekarang berada dalam berbagai kelompok politik dan sosial. Sebelumnya partai Islam sering dianggap mewakili umat Islam sehingga aspirasi umat sering diidentikan dengan aspirasi partai tersebut, meskipun sebenarnya tidak demikian, karena hanya sebagian orang Islam yang masuk partai yang berasaskan Islam tersebut.

Setelah jatuhnya orde baru dari kekuasaan, banyak partai-partai Islam mulai bermunculan. Fenomena munculnya partai Islam ini mengandung spekulasi. Ada yang melihat sebagai “masuknya kembali Islam dalam dunia politik.” Ada pula yang secara serta merta menyuarkan *alarmism* – bagian dari, meminjam istilah Oliver Roy, “imajinasi politik” akan ketidakterpisahan antara wilayah agama, hukum, ekonomi dan politik.

Yang jelas maraknya kehidupan politik Islam dewasa ini sebagai suatu fenomena yang dapat diberikan lebel (re) politisasi Islam. Meskipun demikian, kalau menilik indikator utama yang digunakan sebagai dasar penilaian itu adalah munculnya sejumlah partai yang menggunakan simbol

Islam dan asas Islam atau yang mempunyai pendukung utama komunitas Islam, maka tidak terlalu salah untuk mengatakan bahwa yang dimaksud adalah munculnya kembali kekuatan politik Islam. Sudah sewajarnya kemunculan partai Islam itu dianggap sebagai repolitisasi Islam, karena sudah 32 tahun partai Islam mengalami kekangan orde baru, kembalinya kekuatan politik Islam ini mewarani percaturan politik Indonesia pasca orde baru dan prospek politik Islam kembali.

Dengan Kemunculan kembali partai Islam dapat dijadikan sebagai indikator munculnya kembalinya politik Islam. Romantika politik Islam pada majelis konstituante di masa lalu mengingatkan kembali para aktivis politik Islam untuk mengakat isu Islam politik. Sekarang, pertarungan tidak hanya pada tatanan konsitusi, tetapi sudah masuk pada tatanan ideologi partai-partai Islam. Walaupun Pancasila tetap menjadi landasan Negara, bukan berarti partai juga berazaskan Pancasila tapi berazaskan Islam.

Kemudian yang menjadi pertanyaan pada konteks sekarang adalah benarkah partai-partai Islam itu dapat menampung aspirasi umat Islam dan apakah aspirasi umat itu identik dengan aspirasi partai.

Jika pada masa lalu partai Islam dianggap sebagai aspirasi umat Islam, karena para pemimpin dan aktivis politik Islam awal bergantung pada dua ciri utama. *Pertama*, politik non integratif atau partisan, dimana politik partisipan berkaitan secara langsung dengan pengelompokan politik

Islam sebagai kekuatan politik seperti partai yang dimonopoli oleh partai-partai Islam. *Kedua*, parlemen sebagai lapangan bermain dan arena perjuangan. Para kelompok Islam mencanangkan tujuan-tujuan sosial politisnya yang pada hakikatnya bercorakan non integratif atau paritisan. Diantaranya adalah penegasan Islam sebagai ideologi Negara dan mendesak dilegalisasikannya piagam Jakarta⁷.

Sedangkan Islam pada masa orde baru lebih bersifat kultural dari pada politis. Pada kenyataannya Islam di Indonesia tetap ada watak politisnya. Format atau rumusan Islam politik tersebut mencakup. *Pertama*, landasan teologis dan filosofis Islam politik. *Kedua*, tujuan-tujuan politik Islam. *Ketiga*, pendekatan politik Islam yang sedang berubah dari politik formalitas-legalisme kepada subtansialisme, atau dari politik eksklusivisme kepada inklusivisme.

Perubahan pola politik Islam dari politik formalitas kepada politik subtansialisme tersebut berimplikasi pada perkembangan politik Islam pada masa berikutnya. Sehingga politik subtansialisme mulai mengakar dalam kultur politik Indonesia, walaupun bermunculan partai Islam yang memperjuangkan politik formalitas. Tatap saja perjuangan Islam sebagai ideologi Negara akan semakin sulit terealisasi. Karena ideologi Pancasila yang bersifat sekuler sudah mengakar dalam sistem politik di Indonesia⁸.

Pada konteks sekarang sangat sulit mengatakan bahwa partai Islam itu sebagai wadah aspirasi umat Islam, karena partai Islam sudah terfragmentasi. Kecenderungan sekarang lebih kepada kepentingan individu dari para politisi Islam, bukan kepentingan umat. Sehingga dapat dikatakan pola gerakan partai Islam bergerak kearah pragmatis.

Para tokoh politik (tak terkecuali politikus Islam), sama-sama berusaha menggunakan lambang keagamaan sebagai salah satu alat perjuangan memperoleh kekuasaan, kadang kala dengan cara sinis tetapi pada umumnya melalui proses rasional. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa mereka merupakan anggota dari kelompok-kelompok politik yang diwarnai identitas keagamaan. Maka individu itu akan beranggapan bahwa kepentingan-kepentingan pribadi mereka berkaitan erat dengan kesejahteraan (umat) beragama mereka. Kondisi seperti itulah yang terjadi pada elite-elite politik Islam pada masa sekarang di Indonesia.

Prospek Politik Islam di Indonesia Ditinjau dari Hubungan Antara Islam dan Negara

Islam adalah agama monoteistik yang disebarkan oleh nabi Muhammad

dengan mentransformasikan nilai-nilai islam lewat jalur budaya, misalnya lewat dakwah dan pendidikan, “sedikit” menjauh dari kehidupan politik praktis Meskipun berbeda dalam metodenya namun, meminjam istilah Mahfud Al Anshari, para “*marketing syariah*” tersebut bekerja dengan satu tujuan, mentransformasikan nilai-nilai keislaman di ruang publik

⁷ Sudirman Tebba, “Islam di Indonesia: Dari Minoritas Politik Menuju Mayoritas Budaya”, *Jurnal Ilmu Politik*, No. 4, 1989, hlm. 53-56.

⁸ Mereka percaya bahwa perubahan bisa terjadi

SAW, Al Quran dan Sunah merupakan sumber atau pedoman bagi umat untuk melakukan hubungan-hubungan sosial dan politik. Sehingga, umat Islam (juga non-Islam) pada umumnya mempercayai watak holistik Islam sebagai instrumen ilahiah untuk memahami dunia. Islam seringkali dipandang lebih dari sekedar agama, untuk itu pandangan tersebut menyatakan bahwa Islam tidak mengakui tembok pemisah antara yang spiritual dan yang temporal, melainkan mengatur semua aspek kehidupan.

Sedangkan Negara memiliki kekuatan untuk memaksa dan Negara merupakan entitas yang otonom seperti lembaga-lembaga dan institusi. Bisa dikatakan bahwa Negara adalah sesuatu yang jauh, bahkan asing, kumpulan manusia paling jauh yang dapat dengan mudah berubah menjadi hubungan permusuhan. Maksudnya Negara dapat menggunakan kekuatan memaksa untuk kepentingan-kepentingan pihak tertentu, dan tidak tertutup kemungkinan Negara dimanfaatkan oleh elit politik untuk kepentingan pribadi. Permasalahan sekarang ialah bagaimana kita bisa memberikan titik temu hubungan yang sesuai antara Islam dan Negara di Indonesia.

Pertama memang diakui bahwa jauh sebelum negara ini terbentuk dan merdeka, Islam sudah hadir sebagai faktor yang sangat dominan dalam kehidupan politik, dengan adanya kerajaan-kerajaan Islam, seperti kesultanan Islam. Jadi, jauh sebelum Indonesia ada, sudah ada kekuatan

Islam dalam bentuk kerajaan dan kesultanan yang sudah menerapkan syariat Islam sebagai hukum negara dalam beberapa hal, misalnya masalah perkawinan, warisan dan sebagainya⁹.

Tetapi setelah kemerdekaan, terutama pada masa-masa pembentukan dasar-dasar Negara, Islam malah bukan menjadi faktor dominan dalam politik. Buktinya Piagam Jakarta yang merupakan solusi politik Islam mengalami kekalahan dari kaum nasionalis yang mengusung Pancasila. Sehingga pada akhirnya perjuangan untuk mendirikan Negara Islam di Indonesia tidak terealisasi.

Periode berikutnya, upaya untuk menemukan hubungan politik yang sesuai antara Islam dan Negara terus berlanjut, walaupun dalam intensitas yang sedang. Disisi lain kedigdayaan Pancasila sebagai ideologi Negara terus berlanjut, dan kadang kadang Pancasila ditafsirkan sebagai "Negara Islam" karena mengandung sila ketuhanan yang maha esa. Pada kenyatannya tidak demikian, karena Pancasila lebih cenderung bersifat sekuler (sekuler abu-abu). Karena Pancasila tidak memaksakan ajaran tertentu atau pemahaman tertentu tentang syariah atau sistem agama lain. Maka Pancasila layak disebut sekuler

Pada dasarnya Islam dan politik tidak bisa dipisahkan. Karena, tingkah laku politik seseorang dipengaruhi oleh agama. Tetapi Islam bisa dipisahkan dalam arti Negara harus bersikap netral terhadap

⁹ Bahtiar Effendy. *Islam dan Negara*, Jakarta: Paramadina, 1998).

agama. Dimana Negara tidak memusuhi atau mendukung suatu agama tertentu. Konsep seperti itulah yang seharusnya diterapkan di Indonesia, jika memang Indonesia memilih pilihan sekuler.

Simpulan

Pemikiran politik Islam juga pada dasarnya terpenjara pada tiga mazhab besar. Hampir-hampir seluruh artikulasi pemikiran politik Islam tidak lepas dari bayang-bayang pemikiran bahwa *Pertama*, Islam dan politik itu tidak bisa dipisahkan. *Kedua*, Islam dan politik itu bisa dipisahkan; dan (3) Islam dan politik mempunyai keterkaitan yang erat, akan tetapi bentuk hubungannya tidak bersifat legal-formalistik, tetapi substansialistik.

Berikut gambaran dari ketiga mazhab tersebut dalam sistem politik di Indonesia. *Pertama*, Untuk konteks Indonesia sangat sulit untuk menghilangkan harapan-harapan dari aktivis politik Islam untuk mendirikan Negara Islam. Kerena mereka

menganggap bahwa Islam dan politik tidak bisa dipisahkan, disamping itu adapula legitimasi kultural yang membuat mereka tetap semangat untuk memperjuangkan Negara Islam, dimana mereka menganggap sebelum berdirinya Negara ini masyarakat Indonesia telah menerpakan syariat Islam. *Kedua*, apabila pemisahan agama (Islam) dan politik di Indonesia dipahami dalam konteks sekulerismenya Kristen dan barat maka konsep tersebut tidak sesuai untuk budaya Indonesia. Untuk itu perlu konsep sekuler yang cocok dengan kultur di Indonesia, salah satunya adalah konsep sekulerisme yang ditawarkan oleh An Naim. *Ketiga*, golongan inilah yang banyak bermain dalam percaturan politik Islam di Indonesia pada saat sekarang ini, terutama dalam partai-partai Islam. Keberadan partai Islam ini kembali menghidupkan kembali atmosfir politik Islam di Indonesia. Tetapi tidak sedikit pula para aktivis politik Islam yang memanfaatkan kesempatan ini untuk kepentingan pribadi mereka.

Daftar Pustaka

- Al-Qardhawi, Yusuf. 1997. *Membumikan Syariat Islam*. Penerjemah Drs. Muhammad Zaki dan Drs. Yasir Tajid. Dunia Ilmu. Surabaya
- Abdullah Anaim, Dalam Nasakah Yang Belum Dipublikasikan.
- Brown, L. Carl. 2003. *Wajah Islam Politik*. Penerjemah Abdullah Ali. PT. Serambi Ilmu Semesta. Jakarta
- Black, Antony. 2006. *Pemikiran Politik Islam*. Penerjemah Abdullah Ali. Serambi. Jakarta
- Effendy, Bahtiar. 2000. "Repolitisasi Islam." Dalam A. Suryana Sudarjat, ed., *Fenomena Partai Islam*. Mizan. Bandung, hlm. 205.
- _____. 1998. *Islam dan Negara*. Paramadina. Jakarta

Harun, Lukman. "Mulai Ditinggalkan, Aspirasi Umat Islam Lewat Kelembagaan Formal," Kompas, 22 Oktober 1986.

Tebba, Sudirman. "Islam di Indonesia: Dari Minoritas Politik Menuju Mayoritas Budaya", *Jurnal Ilmu Politik*, No. 4, 1989, hlm. 53-56.

Smith, Donald Eugene. 1985. *Agama dan Modernisasi Politik: Suatu Kajian Analistis*. Penerjemah. Machnun Husein. CV. Rajawali Press. Jakarta